

PEMANFAATAN SERTIFIKAT KOMPETENSI BERBASIS STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA (SKKNI) OLEH ANGKATAN KERJA MUDA

THE USE OF NATIONALLY-BASED-STANDARDIZED-WORK COMPETENCE CERTIFICATE (SKKNI) BY YOUNGSTER WORK FORCES

Dede Mahmudah

Kementerian Komunikasi dan Informatika

BPSDMP Kominfo Jakarta

Kotamadya Jakarta Pusat, Indonesia

dede002@kominfo.go.id

Abstract

To facilitate young workforces so that they have SKKNI-competency-based certificates for global competitions, UPT under the Chamber of Research and Development for Human Resource of Kominfo has participated to conduct SKKNI-based certification processes. One of which is done by BPSDMP Kominfo Jakarta for the first time in Agustus 2018. There are 100 young workforces joining this event. They are vocational school graduates majoring in TIK and not yet working in Bangka District and its surrounding areas. After one year, there hasn't been any data from the competent participants citing the use of the certificates. Therefore, with this research, we hope that we can get a clear picture of the use of this certificate by the competent participants. This research used the descriptive-qualitative method, distributing surveys and questionnaires via Google Forms to all respondents. The data collection was done from 19-28 Agustus 2019. Of 90 populations, 79 of them became respondents. Based on this research, we can conclude that 62% of the respondents (49 people) have used the competency certificate that they have gained. It is suggested that there should be a place for competent participants to report their using the certificates and also to share job vacancies. For further research, it is necessary to massively collect data from all populations and also conduct research in order to show the relation or the effect of holding the certificate to job acceptance.

Keywords: *the use, certificate, SKKNI, competent*

Abstrak

Untuk memfasilitasi angkatan kerja muda agar memiliki sertifikat kompetensi berbasis SKKNI sehingga dapat bersaing secara global, UPT di bawah naungan Balitbang SDM Kominfo ikut melaksanakan kegiatan sertifikasi kompetensi berbasis SKKNI. Salah satunya BPSDMP Kominfo Jakarta yang untuk pertama kalinya melaksanakan kegiatan tersebut pada bulan Agustus 2018. Kegiatan tersebut diikuti oleh 100 orang peserta angkatan kerja muda yang terdiri dari para lulusan SMK bidang TIK yang belum bekerja di Kabupaten Bangka, dan sekitarnya. Setelah satu tahun pelaksanaan kegiatan tersebut, belum terdapat data mengenai pemanfaatan sertifikat oleh peserta yang dinyatakan kompeten. Oleh karena itu, melalui kajian ini diharapkan dapat diketahui gambaran tentang pemanfaatan sertifikat kompetensi berbasis SKKNI yang diperoleh oleh para peserta yang dinyatakan kompeten. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif secara deskriptif menggunakan metode survei terhadap keseluruhan populasi, dengan menggunakan angket yang dikumpulkan melalui survei daring dengan *Google Forms*. Pengumpulan data penelitian dilakukan tanggal 19 – 28 Agustus 2019 dan dari 90 orang peserta yang menjadi populasi penelitian ini, sebanyak 79 orang terjaring menjadi responden. Dari kajian ini dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden yakni sebanyak 62% responden (49 orang) telah memanfaatkan sertifikat kompetensi yang mereka dapatkan. Disarankan perlu adanya wadah yang dapat menjadi tempat bagi para peserta yang kompeten untuk melaporkan pemanfaatan sertifikat yang telah diperoleh serta menjadi forum dibagikannya informasi lowongan kerja. Untuk penelitian selanjutnya perlu dilakukan pengumpulan data secara menyeluruh kepada populasi serta dilakukan penelitian yang dapat menunjukkan hubungan atau pengaruh kepemilikan sertifikat kompetensi berbasis SKKNI dengan tingkat penerimaan responden di dunia kerja.

Kata Kunci: Pemanfaatan, Sertifikat, SKKNI, Kompeten

PENDAHULUAN

Faktor Sumber Daya Manusia (SDM) memiliki posisi yang sangat strategis dalam kegiatan pembangunan. Pembiayaan yang dikeluarkan terkait dengan SDM juga dianggap sebagai nilai investasi yang diprediksi akan meningkatkan nilai tambah bagi kemajuan pembangunan bila dikelola dengan tepat. Karena kegagalan pencapaian sasaran pembangunan disebabkan pula karena adanya kegagalan dalam memposisikan peran dan fungsi SDM secara tepat dan maksimal. Oleh karena itu, setiap Negara terus melakukan berbagai cara untuk mengembangkan masyarakatnya menjadi SDM yang berkompeten. Selain itu dilakukan pendefinisian serta mempersyaratkan bahwa kompetensi tertentu menjadi prasyarat utama seseorang dengan profesi tertentu dapat bekerja di lingkungan negara terkait. Hal ini diperlukan karena globalisasi baik lingkup dunia maupun regional, telah membuka peluang bagi setiap orang untuk dapat bekerja di wilayah Negara mana pun, sehingga perlu adanya persyaratan standar kompetensi atau sertifikasi yang harus dipenuhi oleh siapapun yang ingin bekerja di negara terkait. Salah satunya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) ini memungkinkan satu negara menjual barang dan jasa dengan mudah ke negara-negara lain di seluruh Asia Tenggara sehingga kompetisi akan semakin ketat. Pemerintah Indonesia pun terus berbenah melakukan pengembangan sumber daya manusia (SDM) untuk menghadapi tantangan globalisasi dengan menciptakan tenaga kerja Indonesia yang kompeten, profesional dan produktif (Hapsari, 2016).

Di Indonesia terdapat Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), yang dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi. BNSP merupakan badan independen yang bertanggung jawab kepada Presiden yang memiliki kewenangan sebagai otoritas sertifikasi personil dan bertugas melaksanakan

sertifikasi kompetensi profesi bagi tenaga kerja. BNSP sebagai otoritas penyelenggara sertifikasi kompetensi di Indonesia berperan untuk memastikan kompetensi tenaga kerja. Di Indonesia sendiri sistem dan kebijakan sertifikasi kompetensi profesi, ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada berbagai status, seperti mereka yang sedang mengikuti dan lulus pendidikan formal dan pendidikan kejuruan, mereka yang mengikuti pendidikan dalam masyarakat yang jumlahnya sangat besar dimana mereka umumnya bekerja di sektor informal atau bekerja mandiri, mereka yang sedang bekerja di industri, yang karena kompetensinya yang rendah, tidak mampu mendapatkan fasilitas kerja layak, mereka yang sedang mencari pekerjaan di dalam negeri maupun untuk bekerja di luar negeri, serta keluaran/lulusan Pelatihan Kerja (Hapsari, 2016). Pelaksanaan Sertifikasi Standar Kompetensi tersebut disandarkan pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) berupa rumusan unit kompetensi yang relevan dengan pelaksanaan tugas atau syarat jabatan yang ditetapkan di sebuah tempat kerja.

Menurut Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara, paling tidak terdapat tiga isu utama dalam pengembangan SDM yakni Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), ketersediaan lapangan kerja, dan kualitas tenaga kerja. Khusus terkait MEA, bukan hanya tentang kompetisi sesama negara ASEAN, namun antara sesama Negara ASEAN harus dapat saling memanfaatkan kelebihan masing-masing yang telah ada. Oleh karena itu, salah satu dari tujuh fokus pembangunan sektor komunikasi dan informatika adalah pengembangan SDM. Kementerian Kominfo menitikberatkan pada pendekatan ekosistem, dengan mengoptimalkan sumber daya pemerintah yang terbatas untuk memperoleh dampak yang maksimal. Sebab meningkatkan daya saing SDM sektor Kominfo sangat penting, bukan hanya untuk menghadapi MEA juga untuk menghadapi persaingan global. Sejak tahun 2015 Kementerian Kominfo telah melakukan

tiga program utama yang terkait dengan pengembangan SDM, yakni pengesahan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 24 tahun 2015 tentang pemberlakuan SKKNI bidang Komunikasi dan Informatika, penyusunan rancangan SKKNI dengan melibatkan asosiasi industri dan asosiasi profesi, serta pembinaan individu serta kelembagaan melalui Pelatihan dan Sertifikasi bagi angkatan kerja muda, instruktur, asesor serta dukungan bagi pembentukan LSP (Daon001, 2015).

Oleh karena itu, sejak tahun 2015 pelaksanaan sertifikasi kompetensi berbasis SKKNI bidang Kominfo rutin dilaksanakan oleh Kementerian Kominfo di berbagai daerah di Indonesia, dalam hal ini dibawah naungan Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Informatika (Balitbang SDM Kominfo) Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kepala Balitbang SDM Kominfo, Dr. Ir, Basuki Yusuf Iskandar, MA. menyebutkan pentingnya sertifikasi nasional bagi angkatan kerja muda Indonesia guna memasuki era persaingan, baik di dalam negeri maupun di kawasan ASEAN. Di Era MEA, arus perpindahan barang dan jasa antar negara di Asia Tenggara akan berjalan tanpa hambatan. Oleh karena itu, salah satu aspek penting yang perlu disiapkan oleh bangsa ini adalah SDM yang kompeten (Puslitbang Litprof, 2016).

Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan pengertian bahwa penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Kegiatan fasilitasi sertifikasi SKKNI yang dilakukan oleh Balitbang SDM Kominfo ini dimaksudkan untuk membantu angkatan kerja muda, khususnya lulusan pendidikan kejuruan bidang TIK(lulusan SMK TIK, D1, D2 dan D3), agar memiliki sertifikat sebagai bukti kepemilikan kompetensi standar yang dapat dimanfaatkan dalam mencari pekerjaan. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai pemimpin di sektor pembangunan bidang

komunikasi dan informatika (kominfo), mempunyai tugas mengembangkan SDM dibidang kominfo sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional, yaitu perluasan penciptaan lapangan kerja serta peningkatan keterampilan tenaga kerja.

Sejak tahun 2018, Seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah naungan Balitbang SDM Kominfo ikut melaksanakan kegiatan tersebut karena masing-masing UPT tersebut mendapatkan tambahan tugas fungsi dan pokok dalam bidang pengembangan SDM. Salah satunya adalah Balai Pengembangan SDM dan Penelitian Komunikasi dan Informatika (BPSDMP Kominfo) Jakarta. Untuk pertama kalinya melaksanakan kegiatan sertifikasi kompetensi berbasis SKKNI tersebut. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2018 sampai dengan 30 Agustus 2018 di Hotel Novilla Boutique Resort, Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung. Kegiatan tersebut diikuti oleh 100 orang peserta angkatan kerja muda yang terdiri dari para lulusan SMK bidang TIK yang belum bekerja di Kabupaten Bangka, dan sekitarnya.

Kegiatan ini bekerja sama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) TIK Indonesia, yang berperan sebagai pelaksana kegiatan sertifikasi profesi yang telah mendapat lisensi BNSP. Terdapat tujuh skema yang akan dilaksanakan dalam kegiatan sertifikasi kompetensi ini, yaitu *Practical Office, Help Desk, Junior Networking, Junior Programming, Database Programming, Digital Imaging, dan Junior Technical Support*. Peserta yang mengikuti kegiatan sertifikasi ini sama sekali tidak ditarik biaya oleh penyelenggara. Setelah melalui proses sertifikasi tersebut, 90 orang peserta dari total seluruh peserta dinyatakan kompeten dan berhak mendapatkan sertifikat kompetensi berdasarkan skema yang disertifikasi oleh masing-masing peserta.

Kajian terkait dengan kegiatan sertifikasi pernah dilakukan oleh beberapa pihak. Salah satunya penelitian yang dilakukan

Tabel 1. Daftar Capaian Sertifikasi Kompetensi Berbasis SKKNI Kabupaten Bangka Tahun 2018

No.	Skema	Kompeten	Belum Kompeten	Jumlah
1.	Practical Office	38	1	39
2.	Help Desk	9	0	9
3.	Junior Networking	9	5	14
4.	Junior Programming	1	2	3
5.	Database Programming	0	0	0
6.	Digital Imaging Junior	19	2	21
7.	Technical Support	14	0	14
Total		90	10	100

Sumber : Laporan SKKNI BPSDMP Kominfo Jakarta Tahun 2018

oleh Hapsari (2016), dengan judul “Pengkajian Program Kursus Dan Pelatihan Terkait Dengan Jenis Keterampilan, Sertifikasi Dan Penempatan Lulusan”. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi jenis-jenis keterampilan yang dibutuhkan di dunia usaha dan industri terutama pasar ASEAN yang telah tersedia lembaga sertifikasinya, mengetahui pelaksanaan sertifikasi kompetensinya, dan proses penempatan tenaga kerja yang akan bekerja di luar negeri. Lokasi penelitian dilakukan di BNSP, BKSP, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta BP3TKI. Subyek dipilih sesuai kompetensinya. Penelitian deskriptif kualitatif ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Simpulan penelitian ini adalah bahwa jenis-jenis keterampilan yang dibutuhkan di dunia usaha dan industri terutama pasar ASEAN antara lain pariwisata, operator produksi, kayu lapis, konstruksi. Proses penempatan tenaga kerja yang akan bekerja di luar negeri hanya dapat dilakukan oleh pemerintah dan pelaksana penempatan TKI swasta. Prosedur penempatan dimulai dari pra penempatan, penempatan dan pasca penemp

Kajian yang pernah dilakukan terkait dengan SKKNI dilakukan oleh Lumempow, dkk. (2018) dengan judul “Study Penerapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang K3”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan SKKNI bidang K3 ketenagakerjaan Ahli K3 Muda.

Penelitian ini dilakukan diproyek Pembangunan Gedung Laboratorium Fakultas Teknik UNSRAT. Penelitian dilakukan dengan cara mengamati secara langsung di lokasi proyek disertai dengan pengisian Questioner yang dibagikan kepada 30 orang responden. Dari Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan SKKNI bidang K3 telah diterapkan dengan baik yaitu 99,25% dan dari pengamatan langsung secara visual pada waktu tertentu masih ada pekerja yang tidak mengenakan Alat Pelindung Diri, maka diperlukan sikap Pendisiplinan oleh perusahaan bagi para pelanggar yang tidak memakai Alat pelindung Diri (APD), sehingga dengan begitu PT. Adhi Karya ini mampu bersaing dengan perusahaan lain bahkan perusahaan asing yang ada di Indonesia, baik dari segi kemampuan (pengetahuan dan keterampilan) dan sikap pekerja.

Safitri (2018) melakukan kajian yang diberi tajuk “Manfaat Sertifikasi Profesi Pengelola Kearsipan Dasar pada LSP P1 UI dalam Meningkatkan Kompetensi Lulusan Program Studi Manajemen Informasi Dokumen (MID) Program Pendidikan Vokasi UI”. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui manfaat sertifikasi profesi P1 yang diadakan oleh LSP UI bagi lulusan Prodi MID. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan melakukan survei online melibatkan responden lulusan program studi MID angkatan 2014 dan 2015 yang sudah lulus dari program studi dan memiliki sertifikasi profesi. Batasan Penelitian ini hanya mencakup mahasiswa MID angkatan 2015-2016 sehingga tidak dapat menggambarkan program studi lainnya. Temuan Penelitian Hasil studi ini akan memperlihatkan manfaat dari sertifikasi profesi. Hasil lainnya adalah kemungkinan responden melanjutkan uji sertifikasi di LSP P3 UI setelah masa berlaku sertifikat habis (3 tahun) dan harus diperbarui.

Berbagai kajian lain terkait kegiatan sertifikasi telah banyak dilakukan, namun belum ada penelitian yang secara spesifik mengkaji tentang pemanfaatan sertifikat kegiatan sertifikasi kompetensi berbasis

SKKNI. Selain itu, setelah satu tahun pelaksanaan kegiatan sertifikasi kompetensi tersebut, belum terdapat data yang dimiliki oleh BPSDMP Kominfo Jakarta mengenai pemanfaatan sertifikat oleh peserta yang dinyatakan kompeten. Data tersebut menjadi penting untuk diketahui agar dapat menjadi gambaran pemanfaatan hasil dari kegiatan sertifikasi kompetensi yang telah dilakukan. Oleh karena itu, melalui kajian ini diharapkan dapat diketahui gambaran tentang pemanfaatan sertifikat kompetensi berbasis SKKNI yang diperoleh oleh para peserta angkatan kerja muda yang dinyatakan kompeten saat mengikuti kegiatan tersebut di Kabupaten Bangka pada tanggal 28 – 30 Agustus 2018.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif secara deskriptif untuk menggambarkan tentang pandangan responden, mengenai gambaran pemanfaatan sertifikat yang telah mereka peroleh. Penelitian kuantitatif deskriptif ini hanya memaparkan situasi atau peristiwa, tidak untuk mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi. Data dalam penelitian ini menggunakan metode survei terhadap keseluruhan populasi, dengan menggunakan angket yang berisi serangkaian pertanyaan sebagai dasar dari pengumpulan data. Populasi yang akan menjadi responden dalam penelitian ini adalah seluruh peserta yang mendapatkan sertifikat tanda kompeten dalam kegiatan sertifikasi kompetensi berbasis SKKNI tahun 2018 yang diadakan di Kabupaten Bangka yang berjumlah 90 orang. Data primer tersebut dikumpulkan melalui survei daring yang menggunakan *Google Forms*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Responden dalam penelitian ini adalah peserta kegiatan sertifikasi kompetensi berbasis SKKNI tahun 2018 yang diadakan di Kabupaten Bangka. Kegiatan tersebut ditujukan bagi angkatan kerja muda yang belum bekerja dan lulusan SMK bidang TIK. BPSDMP Kominfo Jakarta menjadi instansi pemerintah yang memfasilitasi kegiatan

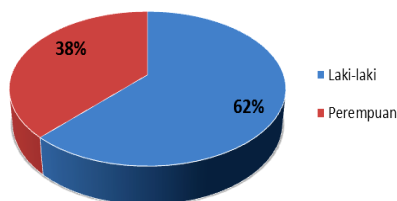
tersebut. BPSDMP Kominfo Jakarta merupakan UPT Balitbang SDM Kekominfo yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pengembangan SDM dan penelitian di bidang kominfo, sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Dan Penelitian Komunikasi Dan Informatika. Dalam melaksanakan tugasnya BPSDMP Jakarta mengacu pada tujuan, sasaran, dan program kerja yang ditetapkan dalam RPJM 2015-2019, Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika, Renstra Badan Litbang SDM dan rencana kerja BPPKI Jakarta.

Dalam kegiatan ini, LSP TIK Indonesia ikut terlibat aktif dan berperan sebagai pelaksana kegiatan sertifikasi profesi. LSP TIK Indonesia merupakan lembaga yang telah memiliki lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) sejak tahun 2007 (BNSP-LSP-018-ID) untuk melakukan proses pembuktian bahwa seorang tenaga kerja yang profesional benar-benar telah kompeten pada bidangnya. Sehingga tenaga profesional tersebut mendapatkan pengakuan atas Kompetensi Profesi yang dimilikinya baik secara Nasional maupun Internasional. Pembuktian kompetensi yang dilakukan oleh LSP TIK Indonesia berdasarkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang merupakan rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai lembaga yang mandiri dan memiliki komitmen dalam penerapan sistem sertifikasi nasional, LSP TIK Indonesia memiliki sejarah panjang dan kontribusi dalam penyusunan SKKNI bidang Komunikasi dan Informatika, penyusunan skema sertifikasi/kualifikasi nasional (KKNI, Okupasi, dan Klaster), pembuatan materi uji kompetensi, pelatihan

dan penyediaan assessor kompetensi, serta pelaksanaan uji kompetensi.

Pengumpulan data penelitian ini dilakukan mulai tanggal 19 Agustus – 28 Agustus 2019, genap satu tahun setelah responden mengikuti kegiatan sertifikasi kompetensi berbasis SKKNI di Kabupaten Bangka. Dalam kurun waktu tersebut, dari 90 orang peserta yang menjadi populasi penelitian ini, sebanyak 79 orang responden aktif mengisi angket yang diberikan. Selama periode waktu pengumpulan data, 11 orang responden tidak memberikan respon. Kemungkinan nomor telepon selular peserta yang tersimpan dalam data peserta sertifikasi kompetensi berbasis SKKNI di Kabupaten Bangka tahun 2018 tersebut sudah tidak aktif. Oleh karena itu, penelitian ini akan menyajikan data yang bersumber dari 79 orang responden tersebut.

Berdasarkan jenis kelamin, jumlah responden yang merespon angket daring dari penelitian ini, 49 orang responden (62%) berjenis kelamin laki-laki sedangkan sisanya sebanyak 30 orang responden (38%) berjenis kelamin perempuan. Kegiatan sehari-hari yang dilakukan oleh responden saat ini diantaranya 34 orang responden (43,04%) sekarang melanjutkan kuliah, 29 orang responden (36,71%) bekerja, dan 9 orang responden (11,39%) kuliah sambil bekerja. Di lain sisi 5 orang responden (6,33%) menyebutkan masih mencari pekerjaan, 1 orang responden (1,27%) memutuskan fokus menjadi ibu rumah tangga, dan 1 orang responden (1,27%) fokus mempersiapkan diri untuk ikut tes menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI).

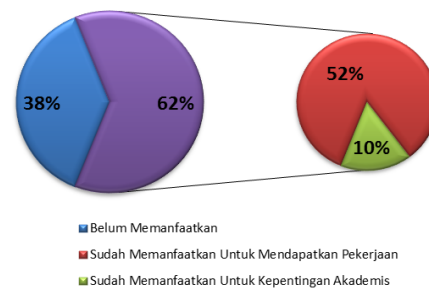


Gambar 1. Responden Berdasarkan Jenis Kelamin



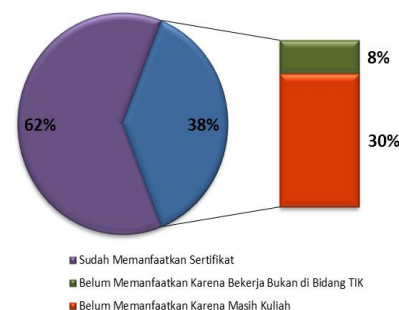
Gambar 2. Responden Berdasarkan Pekerjaan

Terkait dengan pemanfaatan Sertifikat Kompetensi yang responden dapatkan saat mengikuti kegiatan sertifikasi berbasis SKKNI di Kabupaten Bangka pada tahun 2018 yang lalu, 49 orang responden (62%) menyebutkan telah memanfaatkan sertifikat tersebut dan sisanya sebanyak 30 orang responden (38%) menginformasikan bahwa sertifikat yang mereka dapatkan belum dimanfaatkan.



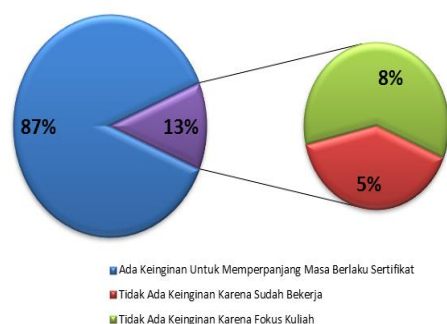
Gambar 3. Pemanfaatan Sertifikat Oleh Responden

Responden yang sudah memanfaatkan sertifikat tersebut, 41 orang responden (52%) menggunakannya untuk mendapatkan pekerjaan dan 8 orang responden (10%) memanfaatkan sertifikat tersebut untuk hal-hal terkait akademik, misalnya untuk mendapatkan beasiswa, untuk mengikuti perlombaan, dan untuk memenuhi persyaratan saat akan sidang skripsi (gambar 3).



Gambar 4. Alasan Responden Belum Memanfaatkan Sertifikat

Responden yang belum memanfaatkan sertifikat yang sudah didapatkan menyebutkan bahwa sertifikat tersebut saat ini dirasa belum diperlukan dalam masa perkuliahan mereka yakni sebanyak 24 orang responden (30%). Sedangkan sisanya sebanyak 6 orang responden (8%) menyebutkan bahwa saat ini mereka sudah bekerja, namun bukan di bidang TIK sehingga sertifikat tersebut belum dimanfaatkan (gambar 4).



Gambar 5. Alasan Responden Tidak Ingin Memperpanjang Masa Berlaku Sertifikat

Dari 79 orang responden, 87% persen diantaranya (69 orang) memiliki keinginan untuk memperpanjang masa berlaku sertifikat kompetensi yang mereka miliki apabila nanti akan habis masa berlakunya. Karena mereka merasa sertifikat tersebut akan dapat terus memberikan manfaat bagi mereka dan memerlukan waktu serta biaya lagi apabila mereka harus mendapatkan ulang sertifikat kompetensi tersebut. Namun, ada 13% responden (10 orang) yang tidak berkeinginan memperpanjang masa berlaku sertifikat kompetensinya. 8% atau 6 orang responden menyebutkan bahwa mereka sedang fokus kuliah sebagai alasan tidak ingin memperpanjang masa berlaku sertifikatnya. Sedangkan sisanya yakni 5% atau 4 orang menyebutkan bahwa sekarang mereka sudah bekerja dan bukan di bidang TIK, sehingga mereka merasa tidak perlu untuk memperpanjang masa berlaku sertifikat tersebut.

Dari responden penelitian ini diketahui pula, bahwa setelah mengikuti kegiatan sertifikasi kompetensi berbasis SKKNI di Kabupaten Bangka tahun 2018 yang lalu, bukan hanya sekedar menambah wawasan

serta mengasah keterampilan yang telah mereka miliki sebelumnya. Namun, mereka juga merasakan manfaat lain dari kegiatan tersebut yakni dapat memperluas jaringan pertemanan serta meningkatkan kepercayaan diri para responden untuk berkarir di bidang TIK. Mereka pun berharap agar kegiatan sertifikasi ini dapat terus secara rutin dilakukan, karena para angkatan kerja muda khususnya yang berdomisili di wilayah kabupaten masih terus membutuhkan fasilitasi untuk meningkatkan kompetensi mereka dibidang TIK serta mendapatkan sertifikat kompetensi yang dapat dijadikan salah satu modal untuk bersaing di dunia kerja.

PENUTUP

Simpulan

Dari data yang telah diperoleh, yang kemudian diolah dan dipaparkan di bagian pembahasan, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden yakni sebanyak 62% responden (49 orang) telah memanfaatkan sertifikat kompetensi yang mereka dapatkan setelah mengikuti kegiatan sertifikasi kompetensi berbasis SKKNI di Kabupaten Bangka pada tahun 2018. Responden yang sudah memanfaatkan sertifikat tersebut, 41 orang responden (52%) menggunakannya untuk mendapatkan pekerjaan dan 8 orang responden (10%) memanfaatkan sertifikat tersebut untuk hal-hal terkait akademik. 38% responden (30 orang) yang belum memanfaatkan sertifikat kompetensi tersebut. Sebanyak 30% (24 orang) masih dalam proses perkuliahan dan merasa sertifikat tersebut saat ini belum diperlukan. Sedangkan sisanya sebanyak 8% (6 orang) saat ini sudah bekerja namun bukan di bidang TIK, sehingga sertifikat kompetensi yang mereka miliki belum dimanfaatkan.

Dari penelitian ini terdapat 11 orang peserta yang memiliki sertifikat kompetensi namun tidak berhasil dihubungi, sehingga tidak diperoleh data dari seluruh populasi mengenai pemanfaatan sertifikat tersebut.

Oleh karena itu, dalam pelaksanaan SKKNI perlu adanya kewajiban bagi para peserta yang telah mendapatkan sertifikat agar secara rutin memberikan laporan pemanfaatan sertifikat yang telah mereka peroleh tersebut. Para peserta tersebut disediakan semacam satu wadah agar dapat terus terhubung dengan pelaksana kegiatan SKKNI di masing-masing satuan kerja atau UPT. Dengan adanya wadah tersebut dapat diketahui dengan pasti dan terbarukan informasi mengenai kondisi peserta setelah mengikuti kegiatan sertifikasi berbasis SKKNI tersebut. Dalam wadah tersebut juga disediakan semacam informasi lowongan kerja, sehingga para peserta yang kompeten dapat langsung melakukan proses pengajuan lamaran kerja kepada pihak industri yang membutuhkan.

Saran

Untuk penelitian selanjutnya perlu dilakukan pengumpulan data secara menyeluruh kepada populasi, sehingga dapat diketahui secara menyeluruh mengenai pemanfaatan sertifikat kompetensi tersebut. Perlu juga dilakukan penelitian yang dapat menunjukkan hubungan atau pengaruh kepemilikan sertifikat kompetensi berbasis SKKNI dengan tingkat penerimaan responden di dunia kerja. Sehingga dapat terlihat seberapa besar pengaruh adanya sertifikat kompetensi dengan kemudahan pemilik responden mendapatkan pekerjaan.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Kepala BPSDMP Kominfo Jakarta yang telah mendorong untuk menyusun kajian ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh responden yang telah aktif memberikan data dalam kajian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Daon001. (2015). *Sertifikasi Tingkatkan Daya Saing SDM Sektor Kominfo*. Diperoleh Tanggal 22 Agustus dari https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/6553/Sertifikasi+Tingkatkan+Daya+Saing+SDM+Sektor+Kominfo/0/berita_satker.
- Hapsari, Melati Indri. (2016). Pengkajian Program Kursus Dan Pelatihan Terkait Dengan Jenis Keterampilan, Sertifikasi Dan Penempatan Lulusan. *JNE 2 (1) (2016). Journal of Nonformal Education*. Diperoleh Tanggal 19 Agustus 2019. Dari <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jne/article/view/5314/4224>
- Lumempow, dkk. (2018). Study Penerapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang K3. *Jurnal Sipil Statik Vol.6 No.12 Desember 2018 (1085-1094)*. Diperoleh Tanggal 28 Agustus 2019. Dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jss/article/view/20875/20563>
- Safitri, Dyah. (2018). Manfaat Sertifikasi Profesi Pengelola Kearsipan Dasar pada LSP P1 UI dalam Meningkatkan Kompetensi Lulusan Program Studi Manajemen Informasi Dokumen (MID) Program Pendidikan Vokasi UI. *Diplomatika, Vol. 2, No. 1 September 2018*. <https://doi.org/10.22146/diplomatika.38470>. Di peroleh Tanggal 28 Agustus 2019. Dari <https://jurnal.ugm.ac.id/diplomatika/article/view/38470/22856>
- Puslitbang Litprof. (2016). *Sertifikasi Nasional Angkatan Kerja Muda Berbasis SKKNI Bidang Komunikasi, Mewujudkan SDM Berdaya Saing Global*, diperoleh pada 6 september 2019 dari <https://balitbangsdm.kominfo.go.id/berita-sertifikasi-nasional-angkatan-kerja-muda-berbasis-skkni-bidang-komunikasi-m-19-174>